

RINGKASAN

Aset tetap seperti gedung, tanah, kendaraan, dan peralatan operasional memiliki peran penting sebagai fondasi pelaksanaan tugas dan peran Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Berdasarkan wawancara dan observasi diidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara pencatatan yang tercantum dalam DBR dengan jumlah barang yang secara fisik ada di ruangan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya potensi permasalahan dalam proses inventarisasi fisik yang seharusnya memastikan data di DBR sesuai dengan kondisi aktual barang di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan inventarisasi aset tetap di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas menurut (Siregar, 2004) yang terdiri dari inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Teknik validitas dan reliabilitas yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa inventarisasi aset tetap yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Banyumas dilakukan pada dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis. Keberhasilan Inventarisasi fisik dilihat melalui kesesuaian antara pencatatan di Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kondisi aslinya, kesesuaian antara pencatatan di Daftar Barang Ruangan (DBR) dengan kondisi aslinya, kepatuhan pegawai dalam melaporkan kondisi barang, dan kepatuhan pegawai pengelola BMN dalam memperbarui pencatatan di DBR. Namun ditemukan adanya ketidaksesuaian antara DBR dengan kondisi aslinya, kurangnya kepedulian pegawai dalam melaporkan pergerakan barang, serta keterlambatan pegawai pengelola BMN dalam memperbarui pencatatan di DBR. Inventarisasi yuridis dilihat melalui identifikasi status kepemilikan dan kepatuhan terhadap prosedur Penetapan Status Penggunaan (PSP). Inventarisasi yuridis sudah berjalan dengan baik sebagaimana setiap aset tetap sudah memiliki bukti kelengkapan dan memiliki SK PSP.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset tetap di BPS Kabupaten Banyumas terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis, inventarisasi fisik menunjukkan perlunya perhatian yang lebih terhadap pemutakhiran data, peningkatan frekuensi pengawasan, dan penguatan budaya akuntabilitas dan kepatuhan pegawai, kemudian inventarisasi yuridis pada BPS Kabupaten Banyumas mencerminkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan dan kesiapan lembaga dalam mengelola aset tetap secara profesional dan efisien.

Kata Kunci: Manajemen Aset, Inventarisasi Aset Tetap, Inventarisasi Fisik, Inventarisasi Yuridis

SUMMARY

Fixed assets such as buildings, land, vehicles, and operational equipment have an important role as the foundation for the implementation of the duties and roles of the Central Bureau of Statistics of Banyumas Regency. Based on interviews and observations, it was identified that there was a discrepancy between the records listed in the DBR and the number of items physically in the room. This indicates a potential problem in the physical inventory process that should ensure that the data in the DBR matches the actual condition of the goods in the field. Therefore, this research was conducted with the aim of describing the inventory of fixed assets at the Central Bureau of Statistics of Banyumas Regency according to (Siregar, 2004) which consists of physical inventory and juridical inventory.

This research uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data sources came from primary and secondary data sources. The data analysis technique used the Miles & Huberman model. The validity and reliability technique used is source triangulation. The results of this study show that the inventory of fixed assets carried out by BPS Banyumas Regency is carried out in two aspects, namely physical inventory and juridical inventory. The success of physical inventory is seen through the conformity between the recording in the Goods Identity Card (KIB) and the original condition, the conformity between the recording in the Room Goods List (DBR) and the original condition, the compliance of employees in reporting the condition of goods, and the compliance of BMN management employees in updating the recording in the DBR. However, it was found that there was a mismatch between the DBR and the original condition, the lack of employee concern in reporting the movement of goods, and the delay of BMN management employees in updating the recording in the DBR. Juridical inventory is seen through the identification of ownership status and compliance with the Procedure for Determination of Use Status (PSP). Juridical inventory has gone well as each fixed asset already has proof of completeness and has a PSP Decree.

Based on the results of the research, it shows that the inventory of fixed assets at BPS Kabupaten Banyumas consists of two aspects, namely physical inventory and juridical inventory, physical inventory shows the need for more attention to updating data, increasing the frequency of supervision, and strengthening the culture of accountability and compliance of employees, then juridical inventory at BPS Kabupaten Banyumas reflects high compliance with regulations and the readiness of institutions in managing fixed assets professionally and efficiently.

Keywords: Asset Management, Fixed Asset Inventory, Physical Inventory, Juridical Inventory